

Optimalisasi Peran Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa

Ahmad Hapid TA*¹, Ira Arini²

^{1,2} Universitas Setia Budi Rangkasbitung

Korespondensi Penulis: *hapidahmadta@gmail.com, ira.arini@gmail.com

ABSTRAK

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi peran kinerja perangkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dari penelitian ini adalah Camat Warunggunung, Kepala Desa Sindangsari, Ketua BPD, Pendamping Desa, Sekretaris Desa, RT, RW dan Tokoh Masyarakat. Adapun hasil penelitian ini Optimalisasi Peran Kinerja dalam meningkatkan Perangkat Desa akan berjalan dengan baik jika sudah melaksanakan indikator dari peran yang sesuai terutama dengan peran Mantri Perangkat Desa desa agar semua pekerjaan sesuai dengan target Perencanaan Desa baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Pelaporan seperti LKPDes, LPPDes dan LRA serta memaksimalkan peran dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana yang tertuang dalam dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Lebak No. 16 Tahun 2017 tentang Prangkat desa.

Kata kunci: Peran, Kinerja, Perangkat Desa.

ABSTRACT

Village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress of the nation through the village. Village officials are required to be able to manage and develop the community and all the resources we have in a good manner (Good Governance) which is characterized by democratic and decentralized characteristics. The purpose of this study is to determine the optimization of the role of village device performance. This study used descriptive qualitative method. The informants of this study were Warunggunung sub-district, Sindangsari village head, BPD chairman, village assistant, village secretary, RT, RW and community leaders. As for the results of this study, Optimization of the Role of Performance in improving Village Equipment will run well if it has implemented indicators of the appropriate role, especially with the role of Village Device Mantri so that all work is in accordance with Village Planning targets both RPJMDes, RKPDes and APBDes, Reporting such as LKPDes, LPPDes and LRA and maximizing the role and function of Village Apparatus as stated in Regent Regulation Number 12 of 2017 concerning Regulations Organizational Structure and Work Procedures of Village Government and Lebak Regent Regulation No. 16 of 2017 concerning Village Promotion.

Key words: Role, performance, village device.

Informasi Artikel: Submit: 2023-06-28 Revisi: 2023-07-26 Diterima: 2023-08-31



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (Kaur), kepala seksi (Kasi), dan unsur kewilayahan atau kepala dusun (Kadus) yang ada di setiap pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada pemerintahan desa terkait peran perangkat desa dalam optimalisasi kinerja di Desa Sindangsari yaitu selain bisa menyelesaikan sebagaimana amanah Peraturan Dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan terhadap masyarakat tetapi peningkatan peran sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa agar bisa bekerja dengan baik dan hasilnya sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan usulan proyek atau kegiatan cenderung didominasi oleh pemerintah desa sedangkan masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan tersebut. Pengembangan pelayanan yang ada didesa umumnya masih terbelah rendah dikarenakan kurangnya peran dari aparatur desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat.

Sebagai pertimbangan bahwa jumlah aparatur Pemerintahan Desa berjumlah 15 orang sedangkan tingkat kedisiplinan aparatur Pemerintahan Desa belum maksimal dan masih jauh dari harapan, masih banyak para pegawai yang terlambat atau tidak hadir dalam melaksanakan program kerja Desa, ini akan berdampak pada kurang tercapainya target dan sasaran dari Program Desa yang akhirnya Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) aparatur Pemerintahan Desa Sindangsari Kabupaten Lebak belum maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi peran dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi, (Sarwono, 2015 : 215). menurut Suhardono (2018:10), peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Ukuran kinerja pada saat yang sama dapat pula merupakan sasaran organisasi. Ukuran ini memberikan pengukuran yang jujur tentang progres atau prestasi individu dan tim. Ukuran kinerja akan memberikan dasar untuk umpan balik yang terbaik (Wibowo, 2014).

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan.

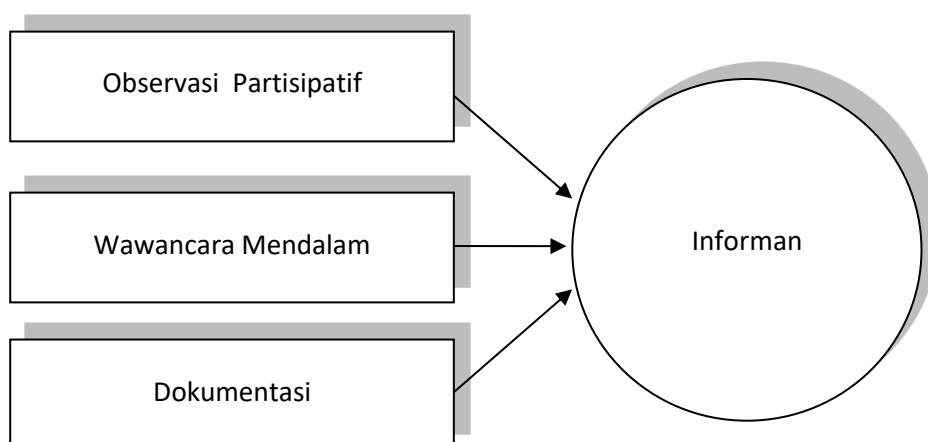
Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralisatis.

METODE PENELITIAN

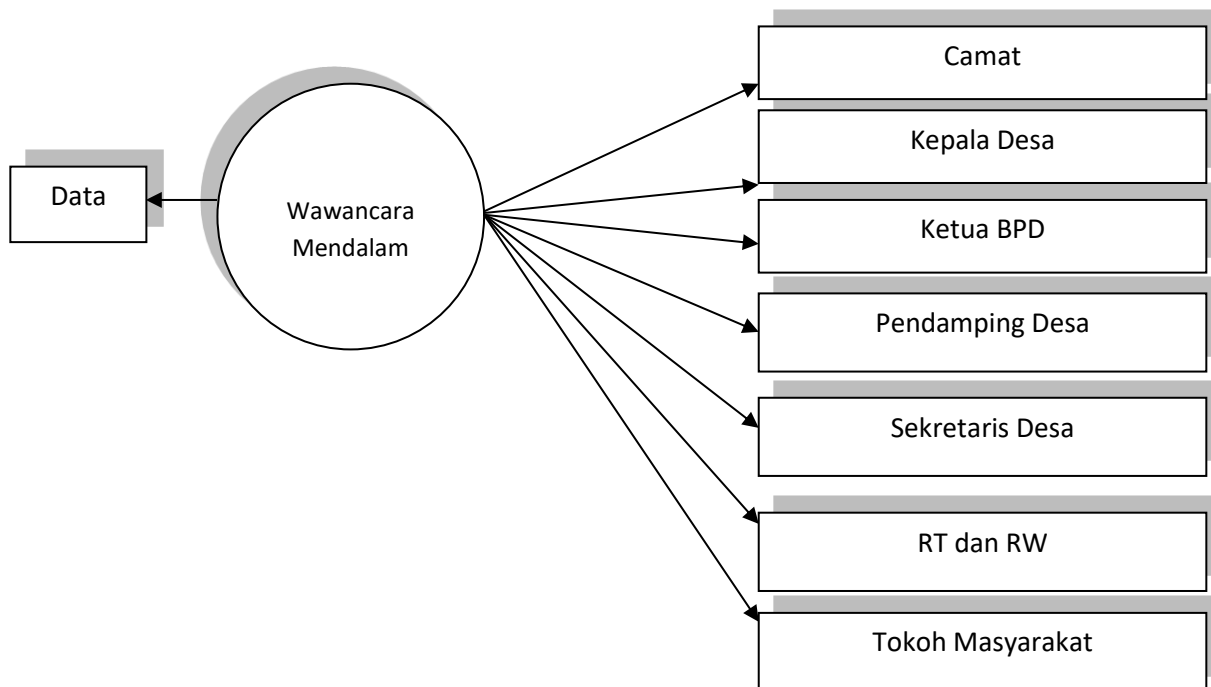
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*. Desain penelitian mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data sampai pada pembuatan laporan hasil penelitian tidak menggunakan upaya kuantifikasi atau perhitungan-perhitungan statistic seperti lazimnya dalam penelitian kualitatif. Komponen dalam metode penelitian kualitatif meliputi antara lain: jenis data, informan dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman wawancara, validasi data teknik analisis data. subyek penelitian yang dimaksud adalah orang (actor), pejabat (aparatur) Pemerintahan Desa Sindangsari Kecamatan Warunggunung yang dipandang mengetahui dan memahami terkait Optimasliasi peran dalam meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Sindansari Kecamatan Warunggunung, dengan pengalaman dan pengetahuan itu mereka bisa memberikan informasi berkenaan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan observasi dengan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pedoman wawancara merupakan hal-hal utama dalam bentuk pertanyaan yang dijadikan acuan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan kepada responden. Alat wawancara yang dapat dipergunakan adalah buku catatan, alat perekam, serta kamera. Pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Optimasliasi peran dalam meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Sindansari Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Penentu responden wawancara dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan.

Untuk menguji validitas data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Untuk itu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

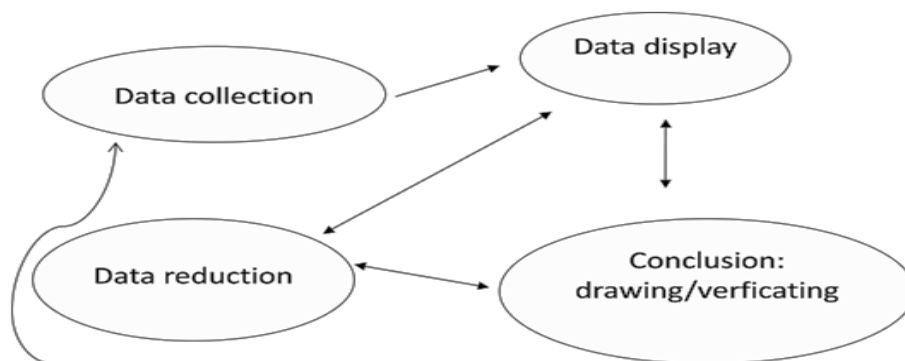


Gambar 3.1 Gambar Triangulasi Teknik Pengambilan Data



Gambar 3.2 Gambar Triangulasi Sumber Data

Analisis data mencakup, *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.



Bagan 3.3 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sindangsari masuk wilayah Kecamatan Warunggunung dengan luas wilayah Desa Sindangsari 1216 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 2.967 jiwa penduduk tetap, 796 KK. di tahun 2021. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya

alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa Sindangsari berada di wilayah Kabupaten Lebak. Keseharian masyarakat desa Sindangsari adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (Kambing, ayam Itik), Perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Sindangsari perbukitan dan peswahan.

Terdapat empat variabel yang sangat menentukan peran dalam sebuah tanggungjawab termasuk dalam optimalisasi peran dalam meningkatkan kinerja perangkat desa, yaitu adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki, tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan, adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan, tingkat kepastian pembagian waktu kerja, tingkat ketepatan pembagian waktu kerja, adil tidak nya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan, serta tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki yaitu maksudnya adalah dalam pembinaan kelompok tani desa tujuan dari yang ingin dicapai tentunya menjadi point penting yang harus dijadikan prinsip dalam mengoptimalkan peran serta dari sebuah organisasi dalam hal ini Pemerintahan Desa Sindangsari yaitu kepastian akan kewenangan yang dimiliki masing-masing pekerja dalam hal ini Perangkat Desa itu sendiri, karena jika sudah diberikan kewenangan tersebut niscaya miskomunikasi dalam penyelesaian tugasnya masing-masing yang sudah dibagi akan mengalami tumpang tindih pekerjaan. Pada prinsipnya kepastian dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat desa di seluruh kecamatan warunggunung ini sudah sesuai Standar Operating Operasional (SOP) atau Tugas Pokok dan Fungsi baik yang tertera dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 atau Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015 tentang Desa, artinya jika melihat dari fungsi yang diberikan terutama kegiatan-kegiatan yang ditugaskan baik dari Dinas terkait dalam hal ini DPMD atau kegiatan di tingkat Kecamatan masing-masing desa sudah melakukan yang sama, yaitu memberikan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, walaupun mungkin ada saja desa yang memberikan pekerjaan diluar yang bukan tupoksinya, tapi saya rasa untuk zaman sekarang dengan banyak pengawasan dan pembinaan dari DPMD maupun di tingkat Kecamatan sudah memahami betul pekerjaannya masing-masing.

RPMJDes merupakan Dokumen wajib yang harus ada di Pemerintahan Desa, berikut dengan dokumen RKPDes dan APBDes, artinya semua penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan yang ada di Desa harus mengacu pada tiga document tersebut, berarti seorang Perangkat Desa harus bisa mengejawantahkan seluruh komponen yang tertuang dalam document tersebut untuk itu point ini yang ingin peneliti dapat sejauhmana sasaran dan tujuan dari program pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh perangkat desa sindangsari dalam melaksanakan semua kegiatannya apakah sudah maksimal atau masih harus diberikan motivasi lain supaya tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Semua aspek sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan, masing-masing perangkat desa melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maksud dari sasaran ini pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan document

perencanaan baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Dalam pertanggungjawaban dalam suatu pekerjaan, artinya perangkat desa selain harus bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, pekerjaan yang lain juga terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kepentingan orang banyak terutama di Desa Sindangsari jelas harus menjadi prioritas utama supaya semua yang mengatasmakan kepentingan masyarakat bisa terlaksana dengan baik, karena pada hakikatnya pemerintahan desa itu hadir untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Perangkat Desa harus senantiasa bersinergi bahu membahu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sindangsari karena itu merupakan document perencanaan yang ada di Desa yang harus dikerjakan setiap tahunnya, jika pekerjaan itu sudah diselesaikan saya rasa perangkat desa sudah memahami dengan sesungguhnya akan tugas dan fungsinya masing-masing, walaupun terkadang dilapangan kita harus benar-benar saling mengingatkan, saling memberikan motivasi dan support sesama perangkat desa, agar ritme pekerjaan sesuai dengan target rencana kerja pemerintahan desa bisa diselesaikan sesuai tahapan.

Tingkat kepastian dalam waktu bekerja para perangkat desa pasti dilakukan karena akan berdampak hak yang diterima oleh setiap perangkat desa setiap tahunnya, yang disebut Siltap (penghasilan tetap). Peran kepala desa dalam memenej pembagian pekerjaan sudah dilakukan dan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing masing hal ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Strategi yang dilakukan selain akan berdampak padak Siltap, Kepala Desa juga melakukan Pengawasan dan Evaluasi setiap kegiatan.

Pembagian kerja yang dilakukan oleh Kepala Desa Sindangsari sudah dilakukan secara adil itu terbukti dengan adanya pembagian sesuai SOTK hal ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Volume pekerjaan sudah mengikuti alur yang dibuat karena setiap tahun anggarannya ada pola dan rencana kerja yang rutin. Kejelasan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa sudah termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Indikator tersebut selain mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, ada hal lain juga yaitu kelengkapan dokumen perencanaan yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

KESIMPULAN

Peran Kinerja Perangkat Desa di Desa Sindangsari Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak sudah optimal, terutama dengan peran Mantri Perangkat Desa desa agar semua pekerjaan sesuai dengan target Perencanaan Desa baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Pelaporan seperti LKPDes, LPPDes dan LRA serta memaksimalkan peran dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana yang tertuang dalam

JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72

DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562

dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Lebak No. 16 Tahun 2017 tentang Prangkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Moehersono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Sarwono, Wirawan Sarlito, 2012. Psikologi Remaja: Definisi Remaja, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Suhardono, Edy. 2018. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

_____ (2014) . Manajemen Kinerja . Edisi Keempat . Jakarta : Rajawali Pers.

_____ (2014) . Perilaku Dalam Organisasi . Edisi 1-2 . Jakarta : Rajawali Pers